Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 29, No. 2, Oktober 2024
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

PERAN *KEDAULATAN RAKYAT* DALAM SOSIALISASI KELUARGA BERENCANA DI YOGYAKARTA (1969-1974)

Arsenia Romana Triwahyuni

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan No. 10, Mrican, Depok, Sleman, 55281, Yogyakarta
Email: romanatriwahyuni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran media massa, khususnya *Kedaulatan Rakyat*, dalam proses sosialisasi program Keluarga Berencana di Yogyakarta pada periode Pelita I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana yang direncanakan oleh pemerintah Orde Baru untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Yogyakarta, mulai disosialisasikan pada masa Pembangunan Lima Tahun I (Pelita I) tahun 1969-1974. Pelaksanaan sosialisasi Keluarga Berencana dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yang didominasi oleh inisiatif dari pemerintah. Pelaksanaan sosialisasi Keluarga Berencana secara langsung dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), sementara pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media massa, yaitu surat kabar. Salah satu surat kabar yang digunakan adalah *Kedaulatan Rakyat*. Surat kabar ini menjadi media komunikasi massa bagi pemerintah untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana melalui berbagai berita yang diterbitkan. Selanjutnya melalui surat kabar *Kedaulatan Rakyat* program Keluarga Berencana dilakukan secara bertahap, mulai dari penerbitan slogan terkait jumlah anak dalam satu keluarga, program Keluarga Berencana sebagai bagian dari Pelita I, hingga metode penggunaan alat kontrasepsi pada klinik pelayanan program Keluarga Berencana.

Kata Kunci: Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, Sosialisasi, Komunikasi Massa, Keluarga Berencana, Orde Baru

ABSTRACT

This study discusses the role of mass media, especially Kedaulatan Rakyat*, in the process of socializing the Family Planning program in Yogyakarta during the Pelita I period. The research findings reveal that the Family Planning program designed by the New Order government to control population growth in Yogyakarta, began its socialization during the First Five-Year Development Plan (Pelita I) from 1969 to 1974. The Family Planning socialization was implemented through direct and indirect methods, predominantly driven by government initiatives. The direct implementation of Family Planning socialization was carried out by the National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) through Family Planning Field Officers (PLKB), while the indirect implementation was carried out through mass media, specifically newspapers. One of the newspapers used was* Kedaulatan Rakyat*. This newspaper became a mass communication media for the government to socialize the Family*

Planning program through published news article. Furthermore, through the Kedaulatan Rakyat *newspaper, the Family Planning program introduced gradually, starting from the publication of slogans related to the number of children in a family, the Family Planning program as part of Pelita I, and explaining contraceptive methods available in Family Planning service clinic.*

Keywords: *Kedaulatan Rakyat* Newspaper, Socialization, mass communication, Family Planning, New Order era

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang sosialisasi program Keluarga Berencana melalui media massa di Yogyakarta pada periode 1969-1974. Sejak diterbitkan pada tahun 1945 *Kedaulatan Rakyat* menjadi salah satu media yang turut berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta berperan dalam memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Yogyakarta (Fahmi Aji, 2018: 269). Seiring berjalannya waktu, pada masa Orde Baru *Kedaulatan Rakyat* menjadi salah satu media massa yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan program kebijakan Keluarga Berencana di wilayah Yogyakarta. Melalui *Kedaulatan Rakyat*, program Keluarga Berencana disosialisasikan melalui berbagai berita dengan narasi positif yang diterbitkan.

Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana peran surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dalam membantu pemerintah Orde Baru untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana ke masyarakat Yogyakarta melalui berbagai artikel berita yang diterbitkan. Sosialisasi melalui media massa merujuk pada fungsi media dalam menyampaikan informasi melalui terbitannya. Dalam proses sosialisasi, media massa berperan sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengantarkan informasi dari dunia luar melalui konten yang diterbitkan. Secara perlahan informasi yang diterbitkan dapat disosialisasikan pada masyarakat, sehingga menciptakan tatanan sosial baru dengan mengagendakan perubahan sosial, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai sosial (Manap Solihat, *Mediator,* 2008*:*106).

Proses sosialisasi Keluarga Berencana, media massa berperan sebagai wadah komunikasi pemerintah Orde Baru dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kebijakannya selama memerintah, oleh karena itu tidak jarang pemerintah berupaya untuk mengawasi dan mengendalikan "komunikasi" melalui media massa agar dapat tetap berkuasa dan kebijakan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu dalam menjalankan komunikasi massa, media massa berperan dalam menjangkau banyak orang serta mempengaruhi opini publik (Denis McQuail, 2011:61). Surat kabar menjadi media komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana, karena surat kabar merupakan salah satu media yang mencatat sejarah umat manusia secara berkesinambungan, sehingga surat kabar secara umum memuat informasi-informasi penting dan menarik (Bradley, 1971: 16-17)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan tahapan penelitian sejarah, yang didalamnya terdapat pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Pada tahap pengumpulan sumber, sebagian besar sumber yang digunakan berupa arsip berbentuk fisik. Arsip surat kabar

Kedaulatan Rakyat dalam bentuk cetak dan digital dapat diakses di *Jogja Library Center* (JLC), atau untuk arsip digital lainnya dapat ditemukan di kantor redaksi surat kabar *Kedaulatan Rakyat.*

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Penduduk dan Program Keluarga Berencana di Yogyakarta

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi persoalan kependudukan yaitu, pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Dinamika pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat memicu terjadinya perubahan pada paradigma kebijakan di bidang kependudukan secara mendasar di Indonesia (Faturochman, 2004:4). Oleh karena itu pada masa Orde Baru terdapat integrasi dalam hal kebijakan kependudukan, sehingga berbagai wilayah di Indonesia mulai menempatkan penduduk sebagai subjek Pembangunan (Faturochman, 2004:5). Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang diarahkan oleh pemerintah untuk mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduknya.

Pada tabel di bawah ini diuraikan pertumbuhan penduduk yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode waktu 1961–1980, sedangkan data dari wilayah per–kabupaten dan kota akan disajikan dalam lampiran :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi DIY berdasarkan Kabupaten / Kota Hasil Sensus Penduduk 1961–1980 (Jiwa)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		1961	1971	1980
1	Kulon Progo	337. 127	370. 629	380. 685
2	Bantul	499. 163	568. 627	634. 442
3	Gunungkidul	571. 823	619. 117	659. 486
4	Sleman	516. 653	588. 313	677. 323
5	Yogyakarta	306. 296	340. 491	389. 089
Jumlah		2. 231, 062	2. 487, 177	2. 750, 128

(Sumber: Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 1961 – 2010).

Jumlah penduduk di Yogyakarta berdasarkan data statistik hasil sensus penduduk dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup banyak. Dengan jumlah angka pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat di setiap kali sensus penduduk membuat pemerintah perlu memperhatikan serta perlu adanya penekanan dalam segi angka pertumbuhan, sehingga pembangunan nasional yang menjadi cita-cita dan tujuan pemerintah dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak guna mendukung dan melaksanakan program yang diberlakukan pemerintah untuk mencapai stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mulai melibatkan masyarakat dalam program pembangunan nasional, secara khusus dalam hal pertumbuhan penduduk.

Program Keluarga Berencana merupakan program yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Program ini merupakan upaya yang disengaja oleh suami dan istri untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, selain

itu Keluarga Berencana juga dilakukan untuk menghindari kelahiran anak yang tidak diinginkan (Winarningsih., dkk. 2024:2). Keluarga Berencana juga diartikan sebagai sebuah tindakan yang dapat membantu individu atau pasangan suami istri mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan dan mengatur interval diantara kelahiran anak (Hartanto, 2004:27). Definisi lain dari Keluarga Berencana atau *family planning/planned parenthood* adalah suatu upaya untuk membuat jarak kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi (Wahyuni. 2017:103). Sementara menurut *World Health Organization* (WHO) Keluarga Berencana adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu individu/pasutri dalam mendapatkan objektif-objektif tertentu, seperti menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Wahyuni. 2017:103).

Program Keluarga Berencana diberlakukan tidak hanya untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Tujuan utama dari pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, sehingga seorang ibu mempunyai kesempatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan dirinya sendiri. Program Keluarga Berencana mengupayakan penekanan angka pertumbuhan penduduk agar dapat sesuai dengan daya dukung dari lingkungan tempat tinggal dan menjadi strategi di bidang kesehatan agar penduduk bisa mendapatkan kualitas kesejahteraan hidup (Prijanti & Rahayu, 2016:4). Secara sederhana program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan cara menurunkan angka kelahiran bayi sehingga jumlah pertambahan penduduk tidak melebihi batas.

Yogyakarta menjadi salah satu wilayah utama pengembangan program Keluarga Berencana. Pemerintah Orde Baru bahkan membentuk pengurus dan membangun klinik khusus yang mengurusi bidang Keluarga Berencana. Selain itu pengembangan program Keluarga Berencana di Yogyakarta didukung dengan pendirian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat daerah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Nomor 35/Kpts/Kesra/X/1970 (Yulizawati, dkk, 2019:34). Dengan berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat daerah pada tahun 1970 tersebut membuat program Keluarga Berencana nasional secara resmi mulai masuk ke Yogyakarta.

Sosialisasi Program Keluarga Berencana dalam Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*

Kedaulatan Rakyat menjadi media sosialisasi nilai baru untuk masyarakat Yogyakarta, selama periode Pembangunan Lima Tahun (Pelita I) yaitu tahun 1969-1974 beberapa kebijakan disosialisasikan termasuk Keluarga Berencana. Sosialisasi kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dalam berbagai berita yang diterbitkan menjadi tempat terjadinya perubahan pola pikir Masyarakat (Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, 2005:402). Hal tersebut bisa terjadi karena media massa dapat menjadi bagian atau wadah dari proses sosialisasi nilai kehidupan.

Hal lain yang dapat menguatkan relasi antara surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan pemerintah ialah dengan gencarnya publikasi berita mengenai program Keluarga Berencana (Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, 2005:402). Salah satu contoh pemberitaan mengenai peran media massa dalam program Keluarga Berencana, disampaikan oleh surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan judul berita "*Peranan Mass Media dalam Program Kel. Berentjana*" isinya sebagai berikut;

> "MASS MEDIA dapat digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum hingga dianggap bahwa mempunjai anak lebih dari dua atau tiga, kurang dapat diterima dalam masjarakat. Demikian Mr Frank Wilder, konsultan mass media pada pemerintah India dalam pesannja jang berdjudul "manfaatkan mass media sebaik2nja" pada sidang kouperensi regional IPPF.
>
> Dikatakan bahwa pengalaman menundjukkan, bahwa dgn menggunakan pesan2 (messages) jang keras didalam mass media kita dapat mentjiptakan dalam masjarakat tekanan-tekanan kuat jang menolak anak ketiga dan keempat tetapi akan mentjapnja sebagai sesuatu perbuatan jang memalukan dan anti-sosial.
>
> Mr. Wilder pernah selama 14 th menjadi konsultan komunikasi massa pada program bantuan luar negeri Amerika Serikat sebelum bekerdja di "Washington Post" dan Associated Press dimana ia mengkritik pemberian arti umum (generalisasi) jg samar2 jang merupakan tjiri2 chas pada kebanjakan propaganda keluarga berentjana.
>
> Dikatakannja, bahwa terlalu sedikit perhatian dan usaha jang diberikan untuk memilih media jg effektip, mentjiptakan pesan2 jang djitu disesuaikan dgn para membatja/pendengarnja dan menggunakan media dan pesan2 tadi setjana effektip.
>
> Mr Wilder mengandjurkan penggunaan ahli mass media jang tidak dapat diabaikan oleh para pembatja/pendengarnja dan menasehatkan pemakaian gagasan2 jang berarti sampai dapat meresap betul2.
>
> Konperensi Keluarga Berentjana Internasional jang diadakan di Bandung sedjak tgl 1 Djuni dihadiri 104 orang delegasi dari luar negeri dan 328 peserta dari berbagai daerah di Indonesia jang terdiri dari pedjabat2 dibidang Kesehatan" (*Kedaulatan Rakyat*, 6 Juni 1969).

Seruan mengenai peran media massa sebagai salah satu media alternatif untuk menyebarkan tentang program Keluarga Berencana tentu harus diperhatikan, karena isi yang ingin disampaikan melalui berita harus dipertimbangkan agar pesan dalam berita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. *Kedaulatan Rakyat* tentunya mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana, karena merupakan bagian dari program pemerintah Orde Baru, akan tetapi dalam proses sosialisasi yang dilakukan dalam media massa harus tetap disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

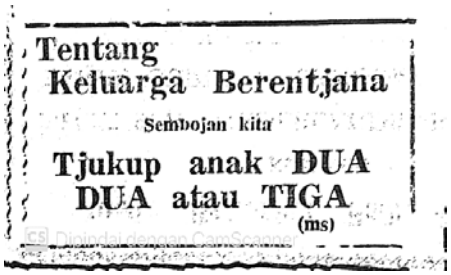
Proses sosialisasi perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga dalam penyampaian program Keluarga Berencana dalam media massa terkesan tidak memaksa. Oleh karena itu sosialisasi Keluarga Berencana melalui media massa dapat membuat masyarakat merasa tidak memiliki tekanan, karena masyarakat dapat melaksanakan program Keluarga Berencana sesuai dengan anjuran dari para ahli kesehatan. Oleh karena itu dalam menyampaikan sosialisasi Keluarga Berencana dalam berita di media massa, narasi yang digunakan harus berkesan dan menarik perhatian masyarakat sehingga isi dari berita dapat dengan mudah diterima tanpa menyinggung pemerintah.

Pada masa Orde Baru, selain lebih berhati-hati dalam menerbitkan berita, KR juga menjadi salah satu media massa yang turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai kebijakannya. Hal tersebut karena ruang gerak dari media massa terbatas, sehingga mau tidak mau harus menurut dengan kehendak pemerintah. Menanggapi program Keluarga Berencana yang menjadi salah satu program pemerintah, *Kedaulatan Rakyat* ternyata menyambut baik adanya program tersebut, karena memang perlu adanya sosialisasi tentang program Keluarga

Berencana untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu *Kedaulatan Rakyat* turut mensosialisasikan Keluarga Berencana dalam berbagai bentuk berita yang diterbitkan, selain itu *Kedaulatan Rakyat* juga membuat narasi positif yang bertujuan agar para pembaca dapat mengerti dan memahami bahwa mereka perlu untuk merencanakan keluarga itu penting, sehingga masyarakat dapat menciptakan keluarganya yang Sejahtera (Octo Lampito., wawancara, 12 Juni 2024).

Pada masa Orde Baru, masyarakat diajak untuk mengambil peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan program pemerintah, sehingga masyarakat kedepannya dapat menjalankan berbagai program pemerintah secara mandiri (Fitriya, 2016: 698). Sosialisasi program Keluarga Berencana banyak mengambil bentuk berupa berita serta opini dengan tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi tersebut untuk mengupayakan masyarakat luas mampu memahami dan menginternalisasi makna dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana oleh pemerintah.

Pemberitaan tentang Keluarga Berencana dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* periode pelita I yaitu tahun 1969-1974 lebih berfokus pada pengenalan program Keluarga Berencana oleh pemerintah. Berikut salah satu publikasi slogan program Keluarga Berencana dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* terlihat pada terbitan edisi 21 Juni 1969 (*Kedaulatan Rakyat*, 21 Juni 1969), yang menjadi awal disosialisasikannya tentang Keluarga Berencana:


Tentang
Keluarga Berentjana
Sembojan kita
Tjukup anak DUA
DUA atau TIGA
(ms)

Gambar 1. Tampilan Slogan Keluarga Berencana di *Kedaulatan Rakyat* tahun 1969

Tampilan slogan Keluarga Berencana di surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memang jarang ditayangkan karena untuk tahun-tahun berikutnya, Keluarga Berencana lebih banyak disosialisasikan dalam bentuk artikel dalam berita. Slogan tersebut menjadi awal berlangsungnya sosialisasi program Keluarga Berencana dalam *Kedaulatan Rakyat*, slogan tersebut menginformasikan ke masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang Keluarga Berencana yang mengajak masyarakat yang membaca surat kabar *Kedaulatan Rakyat* untuk cukup melahirkan dua atau tiga anak saja dalam satu keluarga.

Pemberitaan mengenai Keluarga Berencana dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* semakin meningkat, khususnya pada tahun 1970. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana nasional pada tahun 1970 hingga 1980 dikenal dengan istilah *"management for the people"*, pada periode tersebut lebih banyak inisiatif dari pemerintah untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana ke masyarakat akan tetapi partisipasi dari masyarakat masih rendah karena berfokus pada target dan implementasi di tengah masyarakat yang masih belum memahami dan menerima dengan baik dampak positif dari pelaksanaan Keluarga Berencana (M. S. Noor., dkk. 2022: 6). Oleh karena itu meskipun menjadi program pemerintah pelaksanaan program Keluarga Berencana tidak boleh memaksa masyarakat.

Program Keluarga Berencana dalam Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*

Sosialisasi tentang Keluarga Berencana yang ada dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* hadir dalam bentuk berita dan opini. Beragam pemberitaan tentang Keluarga Berencana yang terdapat di surat kabar *Kedaulatan Rakyat* diharapkan bisa mempermudah para pembaca dalam menerima serta menyaring informasi terkait pelaksanaan Keluarga Berencana. Seperti dalam beberapa berita yang diterbitkan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dalam beberapa artikel yang membahas tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana yang mendapat perhatian serius, bahkan sampai diadakan diskusi, seminar serta konferensi yang bertema Keluarga Berencana. Melalui keterangan menteri kesehatan dalam berita di surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada tanggal 31 Mei 1969 mengatakan bahwa "para ulama menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Keluarga Berencana. Para ulama tidak keberatan jika diberlakukan program Keluarga Berencana, karena pelaksanaan Keluarga Berencana yang akan diadakan di Indonesia bukan hanya untuk menekan angka kelahiran anak, tetapi lebih dari itu pelaksanaan Keluarga Berencana justru berguna untuk kesehatan dan kesejahteraan yang akan didapatkan oleh ibu dan bayi".

> "Menteri Agama, KH Moh Dahlan, jang hadir pula dalam pertemuan dikediaman Dr Idham Chalid itu telah mengadakan tukar pikiran dengan Dr Isam Nazer.
> Moh Dahlan mengatakan bahwa para ulama di Indonesia tidak keberatan terhadap pelaksanaan keluarga berentjana itu. Ditambahkan, bahwa usaha ini patut dapatkan dukungan sepenuhnja demi kemadjuan bangsa kita sendiri. Demikian Humas Dep Sosial" (*Kedaulatan Rakyat,* 31 Mei 1969).

Usaha pelaksanaan Keluarga Berencana didukung sepenuhnya oleh para ulama karena dengan menjalankan Keluarga Berencana, hingga ke depannya setiap keluarga yang ada di lingkungan masyarakat dapat menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera. Dengan terciptanya keluarga yang sejahtera maka akan berdampak pada kemajuan dari bangsa Indonesia, karena pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi tercapai. Dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana tentu yang menjadi sasaran bukan hanya orang-orang yang telah berkeluarga, tetapi juga para generasi muda yang akan menjadi sasaran paling penting dalam sosialisasi program Keluarga Berencana. Generasi muda pada masa mendatang akan menjadi sasaran utama yang harus melaksanakan program Keluarga Berencana, karena mereka yang akan terdampak dan merasakan peningkatan jumlah penduduk.

Peran generasi muda untuk membatasi jumlah pertumbuhan penduduk adalah sebagai pemberi informasi yang benar kepada masyarakat, terutama mahasiswa. Generasi muda yang ada di Yogyakarta memiliki kewajiban untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, oleh karena itu mereka berpartisipasi dalam mensukseskan program nasional Keluarga Berencana. Pelaksanaan diskusi tentang program Keluarga Berencana ini diharapkan dapat semakin membuka pemikiran generasi muda tentang betapa penting melakukan pembatasan jumlah anak, agar menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera dan terurus sehingga dapat hidup dengan layak. Selain itu keluarga yang sejahtera dan hidup yang layak tentu mendapatkan pendidikan yang sesuai, sehingga pada masa mendatang peran dan partisipasi generasi muda secara khusus mahasiswa dapat masuk ke berbagai bidang yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana, baik dari partisipasi yang bersifat konsepsional yaitu kegiatan ilmiah yaitu riset dan seminar, ataupun partisipasi yang bersifat operasional seperti pengontrolan terhadap

pelaksanaan Keluarga Berencana, serta membuat aktivitas-aktivitas tertentu untuk tujuan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang yang dikuasai masing-masing (*Kedaulatan Rakyat,* 5 Juni 1973).

Kritik terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Keluarga Berencana

Opini-opini yang ditemukan dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* adalah kritik dan keresahan terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat dan negara maka sosialisasi program Keluarga Berencana yang lebih bisa menjangkau masyarakat diberbagai daerah, oleh karena itu munculnya opini lain yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pers Daerah ditulis oleh Soendoro, yaitu "seruan mengenai penerangan Keluarga Berencana dengan menggunakan pers berbahasa daerah yang sederhana dan mudah untuk dipahami dengan berbagai variasi yang lebih menarik"(*Kedaulatan Rakyat,* 23 Januari 1973). Permasalahan penduduk yang semakin kompleks membuat perlu usaha dari berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan Keluarga Berencana. Selain itu dalam memecahkan dan menghadapi permasalahan Keluarga Berencana perlu sikap gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat untuk membantu mensosialisasikan Keluarga Berencana.

> "ADAPUN yang mengenai tugas PERS BERBAHASA DAERAH semua pembicara menekankan pada bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, dengan berbagai variasi yang menarik. Dalam mengemukakan informasi, harus jelas ditanamkan MOTIVASI (pertimbangan2 mengapa KB perlu sekali mencapai sukses). Dari sini akan timbul kesadaran dan keinsafan serta keyakinan satu: tiap orang akhirnya memandang perlu menjalankan Keluarga Berencana.
> Ini adalah lawan daripada usaha dengan paksaan atau yang ikut2an, karena belum paham atau menakut2i adalah berjauhan sama sekali. Insaf, sadar dan yakin tidak mengandung ketegangan. Tapi dengan menjalankan sesuatu yang disertai rasa takut masih mengandung ketegangan karena kuatir ,,nanti dimarahi dan dikenakan tindakan.
> Dalam konsep saya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan KB saya kemukakan supaya ada spesialisasi wartawan yang dapat berhubungan dan bekerjasama dengan badan KB, dengan sebutan WARTAWAN KELUARGA BERENCANA (Family Planning Correspondent) dan agar ada ruangan tetap dalam Pers Daerah untuk KB. Dan hendaknya KB yang dananya besar menyediakan penulis2 mengenai soal2 KB, mengingat kekuatan Pers Daerah, berbahasa Daerah tidak kuat keuangannya." (*Kedaulatan Rakyat,* 23 Januari 1973).

Soendoro memiliki pandangan tersendiri terkait program Keluarga Berencana dan Pers Daerah dalam konteks sosialisasi program Keluarga Berencana, yang mencakup strategi komunikasi yang efektif dengan menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu pers berbahasa daerah bertugas untuk menyampaikan sosialisasi program Keluarga Berencana melalui pesan dan informasi yang disesuaikan dengan konteks masyarakat daerah sehingga lebih relevan dan menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian pesan. Tidak hanya dari segi bahasa, pelaksanaan sosialisasi program Keluarga

Berencana dapat disampaikan melalui motivasi, sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan program Keluarga Berencana secara mandiri.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana dapat efektif, ketika sosialisasi berfokus pada pemberian pemahaman konsep programnya daripada melakukan pemaksaan atau bahkan ancaman. Oleh karena itu Soendoro juga menekankan bahwa perlu ada wartawan khusus yang kompeten dan tertarik menulis tentang program Keluarga Berencana, sehingga dalam membuat konten yang memuat informasi seputar program Keluarga Berencana pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun pers berbahasa daerah ternyata menghadapi permasalahan keuangan sehingga tidak tersedianya wartawan-wartawan yang memiliki kapasitas dalam sosialisasi program Keluarga Berencana melalui pers daerah.

Pers daerah berperan penting dalam mensosialisasikan Keluarga Berencana di media massa. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan pengertian Keluarga Berencana di media massa adalah orang-orang yang memang menguasai dan memahami konsep Keluarga Berencana serta dapat menerangkannya dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah untuk diterima oleh masyarakat. Seperti yang diserukan oleh Soendoro;

> "penggunaan pers berbahasa daerah dalam surat kabar untuk mensosialisasikan KB diharapkan dapat memudahkan penerimaan dan penerapan program KB ke lapisan masyarakat di berbagai daerah, selain itu melalui surat kabar sebagai media penyebaran program KB, masyarakat diajak untuk dapat mempertimbangkan betapa penting melakukan pembatasan kelahiran, selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga untuk alasan kesehatan ibu dan bayi." (*Kedaulatan Rakyat,* 23 Januari 1973).

Sosialisasi Keluarga Berencana dengan menggunakan pers berbahasa daerah tentu harus didukung pula oleh para pembicara Keluarga Berencana yang memiliki latar belakang berasal dari daerah tempat Keluarga Berencana akan disosialisasikan. Para pembicara yang mensosialisasikan Keluarga Berencana haruslah orang-orang atau tokoh yang sudah masyarakat kenal dan percaya, sehingga penjelasan mengenai Keluarga Berencana dari para pembicara tersebut dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, karena masyarakat sebelumnya telah mengenal para pembicara Keluarga Berencana dengan baik. Seiring perjalanan waktu, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan program Keluarga Berencana menjadi sorotan. Hal ini disampaikan oleh Selo Soemardjan dalam artikel yang berjudul "Bahasanya sukar dimengerti rakyat desa, sosialisasi KB menurut Selo Soemardjan" (*Kedaulatan Rakyat*, 15 November 1973). Bahasa yang digunakan dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana ternyata sulit untuk dimengerti oleh masyarakat desa, oleh karena itu berdampak pada pesan yang disampaikan secara abstrak membuat sosialisasi Keluarga Berencana ke masyarakat di pedesaan sulit untuk ditangkap dan diterapkan.

> "Buat masyarakat desa2 di Indonesia dewasa ini lebih sesuai dimajukan "*kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak*" sbg tujuan Keluarga Berencana; dari pada tujuan "menyesuaikan hubungan antara produksi manusia dan produksi barang2 dan jasa2". Karena mensejahterakan ibu dan anak dapat ditujukan kepada masyarakat Indonesia baik di Jawa; Madura dan Bali; yang sudah padat penduduknya maupun di pulau2 lain yang sekarang secara ekonomis masih kurang penduduknya; demikian pendapat Prof Selo Soemardjan

pada seminar penyempurnaan Pola Dasar penerangan & Motivasi Keluarga Berencana di Jakarta.

Pesan abstrak sukar ditangkap

Pesan terpenting utk sampaikan kepada masyarakat; menurut pembicara ; adalah tujuan daripada Keluarga Berencana; karena tujuan inilah merupakan bagian yang amat sukar tangkap dan di insyafi kegunaanya oleh mereka berhubung dgn sifatnya yg abstrak serta baru tampak hanya dalam jangka waktu yg panjang. Pesan komunikasi yg biasanya lebih mudah diterima dan dipahamkan oleh masyarakat adalah pesan yg bersifat kongkrit; mengenai kepentingan pribadi orang seorang; hasilnya menguntungkan dan dapat dicapai dlm waktu singkat. Menurut Prof Selo Soemardjan; nilai2 sosial yg dianjurkan dlm ajaran Keluarga Berencana di dlm banyak hal berbeda kalau tidak dikatakan yg berlaku sejak lama dikalangan masyarakat desa pada umumnya.

Bahasanya sukar

Prof Selo Soemardjan yg sekarang menjabat sbg sekretaris wakil presiden; lebih lanjut mengemukakan bahwa banyak sekali bahan penerangan yg disebarkan keseluruh Indonesia dengan bahasa yg sukar dimengerti masyarakat petani di desa. Adalah tugas para juru penerang KB utk "menterjemahkan" bahan2 penerangan tsb kedalam bahasa yg dapat dimengerti oleh rakyat. Mengenai saluran penerangan; pembicara mengemukakan juga; bahwa saluran2 bahan penerangan dari luar kedesa adalah kepala desa; guru agama; guru sekolah atau pemimpin agama.

Beri kutipan dan teladan

Mengingat kuatnya kepercayaan agama atau mendalamnya sistem kepercayaan dlm masyarakat desa; penerangan KB dapat dikukuhkan dgn kutipan dari ajaran agama atau sistim kepercayaan lainnya dgn di tambah macam2 atau contoh2 kehidupan orang2 besar di jaman lalu yang diagungkan masyarakat. Menurut Prof Selo Soemardjan pemusatan penerangan KB sebaiknya pada golongan masyarakat yg berpandangan luas; golongan masyarakat yg berpengaruh; dan para pemuka masyarakat atau pemimpin tidak resmi (informal-leader). Pembicara harapkan dilakukan usaha2 agar masyarakat mengubah nilai2 sosialnya yg sudah sejak lama menjadi pedoman hidupnya. Usaha ini harus dilakukan terus menerus sampai pada akhirnya tertanam pada nilai2 positif terhadap keluarga kecil (sedikit jumlahnya) dan negatif terhadap keluarga besar (banyak jumlahnya); demikian: Prof Selo Soemardjan." (*Kedaulatan Rakyat*, 15 November 1973).

Artikel tersebut menyajikan beberapa pandangan Selo Soemardjan mengenai program Keluarga Berencana yang disosialisasikan ke masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan sosialisasi program Keluarga Berencana harus difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, karena masyarakat akan lebih mudah menerima dan memahami bahwa untuk mencapai kesejahteraan ibu dan anak masyarakat harus bisa melaksanakan program Keluarga Berencana secara mandiri. Namun, Selo Soemardjan juga mengakui bahwa dalam proses sosialisasi program Keluarga Berencana terdapat kesulitan dalam menyampaikan pesan secara abstrak serta kendala bahasa dalam menterjemahkan yang lebih sederhana untuk disampaikan ke masyarakat. Kesulitan bahasan dan penyampaian pesan abstrak membuat masyarakat sulit menerima program Keluarga Berencana, karena manfaat dari pelaksanaan program Keluarga berencana tidak langsung terlihat hasilnya dan baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu daripada

menggunakan pesan abstrak, masyarakat akan lebih mudah menerima penyampaian pesan yang lebih konkret dan menunjukkan hasil yang lebih cepat, sehingga sosialisasi program Keluarga Berencana dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat.

Selo Soemardjan juga menekankan bahwa dalam proses sosialisasi sebaiknya menambahkan contoh berdasarkan pengalaman kehidupan orang atau tokoh yang dihormati oleh masyarakat, mengingat masyarakat pedesaan memiliki sistem kepercayaan dan agama yang kuat, sehingga dalam kegiatan sosialisasi dapat diperkuat dengan kutipan dari sistem kepercayaan atau ajaran agama. Untuk menjalankan program Keluarga Berencana juga diperlukan dukungan dan partisipasi langsung dari golongan masyarakat yang memiliki pandangan luas serta berpengaruh. Sehingga pada akhirnya golongan masyarakat tersebut dapat membantu mengubah nilai sosial yang sebelumnya menjadi pandangan masyarakat serta telah dipegang sejak lama dan menjadi pedoman hidup, kemudian dapat ditanamkan nilai sosial baru yang lebih positif dan disesuaikan dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan program Keluarga Berencana yang harus disosialisasikan secara terus-menerus dan berkelanjutan agar masyarakat dapat menerima dan menerapkan konsep keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan anjuran program Keluarga Berencana.

Pada proses sosialisasi program Keluarga Berencana, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memang menjalankan peran serta fungsinya sebagai media komunikasi massa, antara pemerintah dan masyarakat. Walaupun menjadi objek kontrol untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana, *Kedaulatan Rakyat* masih tetap mempertahankan sifatnya sebagai media independen yang bebas, sehingga dalam proses sosialisasi program Keluarga Berencana, masih terdapat kritik yang ditampilkan melalui terbitan *Kedaulatan Rakyat*. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berjalan seiringan dengan pelaksanaan sosialisasi Keluarga Berencana terdapat berbagai hal yang perlu menjadi evaluasi dari pemerintah dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan sosialisasi Keluarga Berencana ke masyarakat, sehingga ke depannya kegiatan sosialisasi dan pelaksanaannya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Kedaulatan Rakyat berperan penting dalam sosialisasi Keluarga Berencana di Indonesia, secara khusus di Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari artikel berita yang secara rutin diterbitkan oleh *Kedaulatan Rakyat*, mulai dari perencanaan program Keluarga Berencana, sosialisasi program Keluarga Berencana yang memuat pengertian, manfaat dan tujuan pelaksanaanya, hingga pada tahap pengenalan metode kontrasepsi yang tersedia dan dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang terpenting melalui artikel berita yang terdapat dalam *Kedaulatan Rakyat* masyarakat dapat mengetahui cara mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana di berbagai klinik yang ada di Yogyakarta. Sosialisasi program Keluarga Berencana dalam *Kedaulatan Rakyat* secara tidak langsung membuka pandangan masyarakat yang ada di Yogyakarta.

Sosialisasi program Keluarga Berencana dalam *Kedaulatan Rakyat* melakukan berbagai pendekatan, agar program tersebut dapat dijalankan oleh seluruh masyarakat di Yogyakarta. Melalui beberapa artikel di *Kedaulatan Rakyat*, sering terdapat narasi yang membujuk masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan program Keluarga Berencana dengan penekanan dalam hal manfaat dari menjalankan program Keluarga Berencana bagi suami dan istri. Sosialisasi program Keluarga Berencana di *Kedaulatan Rakyat* juga menggunakan pendekatan secara normatif yang

artinya bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana sesuai dengan norma dan baik untuk diikuti oleh masyarakat. Melalui berbagai artikel berita yang terpampang, masyarakat diajak untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan menjalankan program Keluarga Berencana, karena selain untuk mengurangi jumlah anak tetapi juga untuk kesehatan ibu dan anak, dan yang terpenting dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan mengurangi jumlah anak dapat menciptakan ketahanan dalam keluarga serta mencapai tujuan terbentuknya sebuah keluarga sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Aji, Fahmi. 2018. "Perkembangan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* dalam Perpolitikan Masa Kemerdekaan di Yogyakarta tahun 1950-1967". *Jurnal Ilmu Sejarah-S1*. Vol. 3, No. 2.

Fitriya, F. I. D. A. H. 2016. "Peranan Majalah Panjebar Semangat dalam sosialisasi kebijakan program KB pemerintah Orba di Surabaya Tahun 1970-1978". *Avatara.* Vol. 4, No. 3.

Solihat, Manap. 2008. "Komunikasi Massa Sosialisasi", dalam Jurnal Komunikasi, *Mediator* Vol. 9, No. 1.

Buku

Badan Penerbit *Kedaulatan Rakyat*. 2005. *Seteguh Hati Sekokoh Nurani*. Yogyakarta: PT. BP. *Kedaulatan Rakyat.*

Faturochman. 2004. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Hartanto, H. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi,* Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

McQuail, Denis, diterjemahkan oleh Putri Iva Izzati. 2011. *Teori Komunikasi Massa, Edisi 6 jilid 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Noor, M. S., dkk. 2022. *Buku Ajar Partisipasi Pria dalam Program keluarga Berencana.* Yogyakarta: Penerbit Alumni.

Wahyuni, Candra. 2017. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.* Kediri, Jawa Timur: Strada Press.

Winarningsih, Arum Rahayu., dkk. 2024. *Keluarga Berencana.* Makassar, Sulawesi Selatan: Tohar Media.

Yulizawati, SST, M. Kem., Dkk. 2019. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo : Indomedia Pustaka.

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat, 6 Juni 1969

Kedaulatan Rakyat, 21 Juni 1969

Kedaulatan Rakyat, 31 Mei 1969

Kedaulatan Rakyat, 23 Januari 1973

Kedaulatan Rakyat, 5 Juni 1973

Kedaulatan Rakyat, 15 November 1973

Wawancara

Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Peran dalam subjek penelitian	Pekerjaan	Alamat
1.	Drs. Octo Lampito, M. Pd	60 Tahun	Narasumber	Pemimpin Redaksi *Kedaulatan Rakyat*	-